



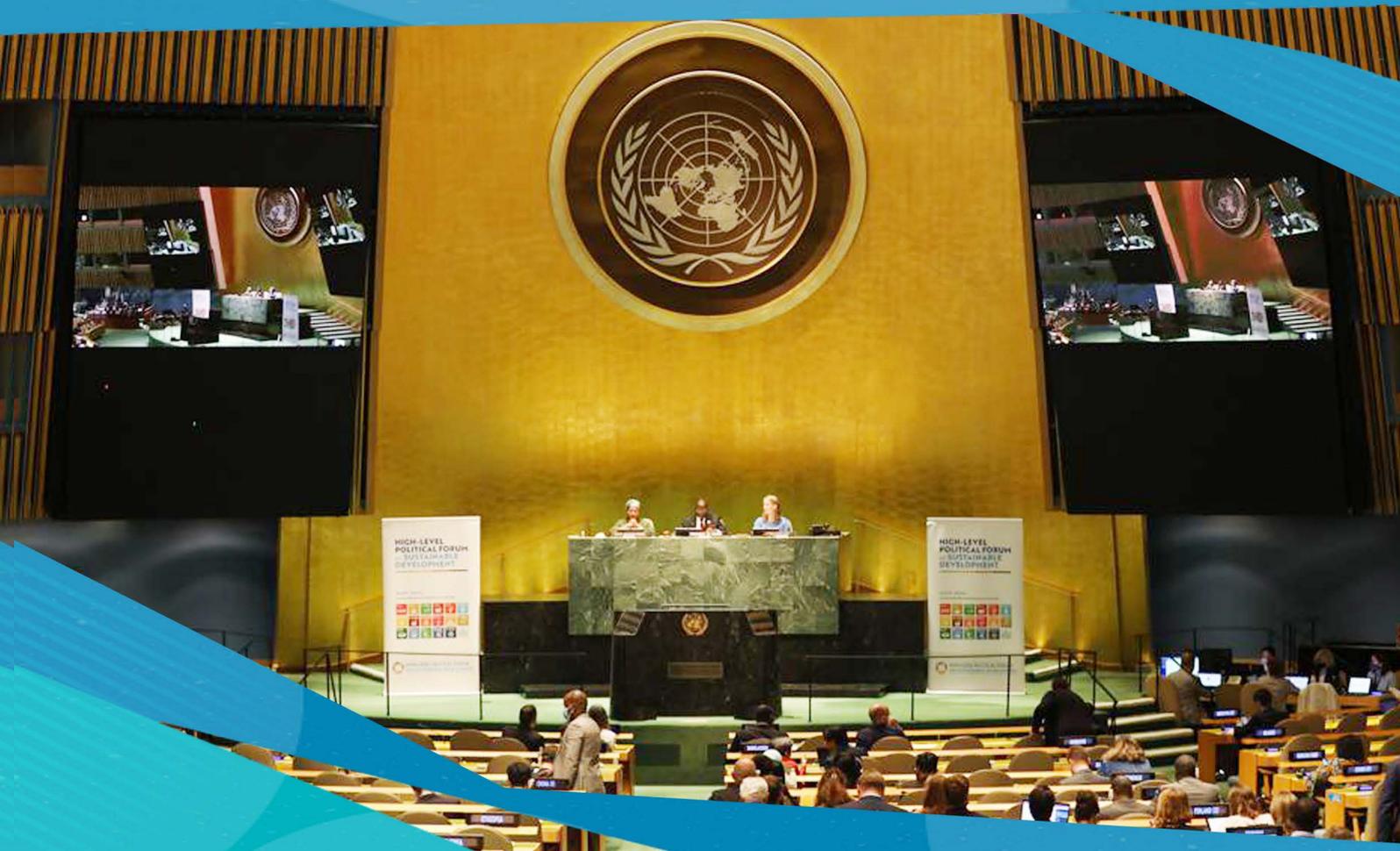
HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN TAHUN 2022

“Parliamentary Forum
at the UN High-Level Political Forum
on Sustainable Development 2022”

New York - Amerika Serikat

11-15 Juli 2022





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

“Parliamentary Forum at the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development 2022”

New York – Amerika Serikat
11 - 15 Juli 2022

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI menghadiri Parliamentary Forum at the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development pada tanggal 11 - 15 Juli 2022 di New York, Amerika Serikat berdasarkan Surat Tugas No. 243//KU.05.01/07/2022, tanggal 11 Juli 2022.

B. SUSUNAN DELEGASI

No.	Nama	Jabatan / Fraksi	Ket
1.	Putu Supadma Rudana, M.BA	Wakil Ketua BKSAP DPR RI F-PD (A-563)	Ketua Delegasi
2.	Dr. Mardani Ali Sera	Wakil Ketua BKSAP DPR RI F-PKS (A-422)	Anggota Delegasi
3.	Achmad Hafisz Tohir	Wakil Ketua BKSAP DPR RI F-PAN (A-487)	Anggota Delegasi

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

Maksud dan tujuan pengiriman Delegasi DPR RI ke *Parliamentary Forum at the UN High-level Political Forum on Sustainable Development* pada tanggal 11-15 Juli 2022 di New York, Amerika Serikat yaitu:

- a. Memanfaatkan Parliamentary Forum at the UN High-level Political Forum on Sustainable Development pada

tanggal 11-15 Juli 2022 di New York, Amerika Serikat untuk membina dan mengembangkan hubungan persahabatan dengan negara-negara anggota IPU dalam kerangka kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

- b. Melakukan peran diplomasi parlemen sebagai salah satu unsur penting total diplomacy, dalam rangka memfasilitasi dan mendukung kebijakan politik luar negeri RI. Pertemuan kali ini mengangkat tema kemitraan sesuai dengan tujuan ke-17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs).

D. MISI DELEGASI

Adapun misi Delegasi DPR RI mengikuti sidang tersebut, antara lain adalah:

- a. Memperdalam pengetahuan terkini mengenai TPB khususnya terkait topik kemitraan dan kerjasama pembangunan sesuai dengan tujuan ke-17 SDGs.
- b. Menyampaikan pandangan parlemen Indonesia mengenai topik-topik di atas dan memastikan bahwa prinsip kemitraan dan kerjasama menjadi pendorong dalam mencapai tujuan SDGs terutama di masa-masa pascapandemi.
- c. Memanfaatkan event tahunan IPU yang diselenggarakan di PBB ini untuk memperkuat dialog multilateral DPR RI dengan berbagai lembaga internasional dan negara.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Sebagai persiapan substansi Delegasi DPR RI ke pertemuan dimaksud, TA BKSAP telah menyiapkan bahan masukan untuk setiap pertemuan terkait isu-isu yang terkait dengan TPB. Adapun untuk persiapan teknis, Sekretariat BKSAP DPR RI telah melakukan koordinasi dengan pihak Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA ACARA

10.10 : Opening

- **Ms. Paddy Torney**,
Head of the Office of the Permanent Observer of the IPU to the United Nation representing Mr. Duarte Pacheco, President of the IPU.

10.10 : Panel I: Domestic Revenue Mobilization

- **Moderator: Lord Jack McConnell**
House of Lords of the United Kingdom
- **Prof. Jayati Ghosh**
University of Massachusetts Amherst, member of the Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (remote, New Delhi))
- **Ms. Toril-Iren Pedersen**
Assistant Director, Department for Partnerships and Shared prosperity, Section for governance and transparency, Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad), Addis Tax Initiative representative
- **Ms. Tove Maria Ryding**
Policy and Advocacy Manager – Tax Justice, Eurodad (remote, Brussels)

Leading questions:

How can development cooperation support greater domestic revenue mobilization?

How effective are global arrangements to tax multinationals and stop tax havens in unleashing additional resources for the SDGs?

How can tax regimes be made more progressive, so that higher income earners, including from financial capital, contribute their fair share?

11.30 : Panel 2 : Aid and Public-private partnership

- **Moderator: Ms. Petra Bayr, MP**
National Council of Austria
- **Mr. Walid Badawi,**
Deputy Director, Bureau for External Relations and Advocacy, UNDP
- **Mr. Vitalice Meja**
Co-Chair, Global Partnership for Effective Development Cooperation, Executive Director of Reality of Aid, Africa
- **Ms. Colette Selman**
Director of Core Gavi Countries, GAVI Vaccine Alliance (remote, Geneva)

Leading Questions

How can aid be made more effective in supporting health care, education, and other such public goods?

How can the uses of aid as a catalyst of other flows of development finance be improved?

How effective are public-private partnerships as a way of financing infrastructure projects?

12.50 : Closing

- **Mr. Martin Chungong**
Secretary-General of the IPU

B. JALANNYA PERSIDANGAN

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19, gelombang krisis sosial, ekonomi, dan politik, telah meningkatkan kemiskinan, memperdalam kesenjangan, dan membalikkan kemajuan yang telah dicapai dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals (SDGs)*, termasuk tujuan ke-17, yang fokus pada kemitraan. Dalam menanggapi hal ini, *the Parliamentary Forum*, yang selanjutnya disebut Forum, berupaya untuk menjawab pertanyaan ini sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu *“Partnership and development cooperation: Are they delivering for the SDGs?”* Forum fokus pada 3 (tiga) target yang merupakan kunci terkait pembiayaan SDGs, yaitu mobilisasi pendapatan domestik, pendampingan pembangunan, dan kemitraan publik-privat.

Forum yang dihadiri oleh 80 Anggota Parlemen dari 27 negara merupakan kesempatan bagi para anggota parlemen untuk mendapatkan sudut pandang dan informasi dari para pakar, serta mendiskusikan bagaimana peran pengawasan parlemen dapat memperkuat kualitas dan kuantitas pendanaan SDG. Forum dapat berkontribusi pada persiapan *“The Effective Development Co-operation Summit”*, yang direncanakan pada bulan Desember di Jenewa, Swiss.



2. SESI PEMBUKAAN

Mewakili **Mr. Duarte Pacheco**, Presiden IPU, **Ms. Paddy Torsney**, Head of the Office of the Permanent Observer of the IPU to the United Nation di New York, menyatakan bahwa jika kita ingin segera mencapai tujuan-tujuan SDGs, sekarang merupakan waktunya. Perubahan dramatis dibutuhkan dalam

memulihkan berbagai kesempatan yang hilang akibat pandemi COVID-19, perang, maupun berbagai krisis lainnya.

Kekayaan harus didistribusikan secara lebih merata sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan, memobilisasi sumber daya pelayanan kesehatan, pemulihan kerusakan lingkungan, infrastruktur, dan berbagai prioritas lainnya.

Terkait hal tersebut di atas, Pemerintah tidak dapat melakukan semua sendiri, walaupun merupakan aktor utama dalam pemenuhan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen Global menyatakan anggaran terkait dukungan pembangunan yang mencapai 0.33% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara donor harus ditingkatkan menjadi 0.7%. Pemerintah harus mengikuti empat prinsip sesuai dengan keputusan *Global Partnership for Effective Development Co-operation*, yaitu sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara; fokus pada hasil; transparansi, dan akuntabilitas, serta kemitraan yang inklusif.



Pimpinan BKSAP DPR RI
hadir di Markas Besar PBB
Foto: Dok BKSAP

3. MOBILITAS PENDAPATAN DOMESTIK

Permasalahan perpajakan memiliki kaitan yang erat dengan isu pembiayaan dan tata kelola. Jika dikelola dengan baik, perpajakan nasional akan membantu pembangunan, menciptakan masyarakat yang sehat, menjaga perekonomian, mengurangi kemiskinan, serta kesenjangan. Pendapatan dari pajak harus bisa ditingkatkan, terutama pada negara-negara berkembang, dimana pandemi COVID-19 mempersulit negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Pembicara menekankan kebutuhan melakukan reformasi sistem tata kelola perpajakan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak mempertimbangkan fenomena saat ini,

...upaya menarik pajak dari para pembayar pajak akan lebih mudah dilakukan, selama mereka merasakan dampak dan hasil dari uang yang mereka keluarkan.

seperti perusahaan multinasional yang memiliki operasional, menghasilkan keuntungan, dan menyimpan kekayaan lintas negara. Dalam mengatasi kesenjangan, dan menghasilkan pendapatan negara yang dibutuhkan, pemerintahan berbagai negara harus fokus untuk menarik pajak dari kelompok terkaya, maupun perusahaan besar lintas negara ini.

Secara umum, poin utama pada pertemuan tersebut adalah jumlah penarikan pajak harus berjalan beriringan dengan perbaikan fasilitas publik dan infrastruktur. Ditekankan pula bahwa, upaya menarik pajak dari para pembayar pajak akan lebih mudah dilakukan, selama mereka merasakan dampak dan hasil dari uang yang mereka keluarkan.

a. Rekomendasi untuk melakukan reformasi sistem perpajakan internasional:

- **Merubah metode pemenerikan pajak dari perusahaan multinasional**

Beberapa perusahaan multinasional menarik keuntungan dengan adanya kebijakan beberapa negara surga pajak / *tax haven*, maupun adanya celah hukum di beberapa negara sehingga mereka dapat membayarkan pajak yang lebih rendah daripada perusahaan lokal. *The Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT)* mengusulkan agar perusahaan transnasional diperlakukan sebagai satu badan usaha, bukan sebagai entitas yang terpisah di setiap negara. Hal ini penting agar perusahaan tersebut dapat dipajaki sesuai dengan keuntungan yang didapatkan secara global.

- **Menciptakan sistem perpajakan minimal secara global**

Proposal ICRICT juga mengusulkan pajak global minimal 25% sehingga perusahaan multinasional dapat ditarik pajak mendekati yang dibebankan kepada perusahaan lokal.

- **Mengadopsi daftar aset global**

Sebuah sistem daftar isian aset komprehensif dan mudah diakses harus disusun yang berisi siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Hal ini penting karena seringkali pihak yang mendapatkan keuntungan tidak selalu pemilik legal perusahaan. Informasi lainnya bisa ditambahkan, seperti kepemilikan *real estate*, jumlah piutang, surat berharga, barang seni, perhiasan, maupun aset kendaraan mewah. Negara-negara G20 dapat menjadi contoh dalam menyusun daftar tersebut.

Masalah penghindaran pajak lintas negara sulit diselesaikan secara nasional, sehingga dibutuhkan kerjasama global.

- **Modernisasi sistem pengumpulan pajak**
Reformasi perpajakan penting dengan mempertimbangkan untuk menarik pajak kekayaan tidak hanya dari *real estate*, tetapi juga dari berbagai aspek fisik dan finansial lainnya. Beberapa sektor juga mendapatkan keuntungan selama pandemi, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menarik pajak dari sektor tersebut.
 - **Bergabung dengan kelompok atau aliansi yang fokus pada isu ini**
Addis Tax Initiative merupakan sebuah kemitraan multi-pihak yang bertujuan untuk penguatan kapasitas mobilisasi pendapatan domestik. Sekitar 70 anggota mendapatkan keuntungan dari berbagi pengalaman, peningkatan kapasitas terkait kebijakan, serta administrasi perpajakan. Beberapa negara telah memiliki komitmen untuk secara kolektif menggelontorkan dana senilai US\$ 441 juta per tahun terkait pajak yang berhubungan dengan bantuan pembiayaan pembangunan.
 - **Mendukung konvensi perpajakan Perserikatan Bangsa-Bangsa**
Grup Afrika PBB telah mengusulkan konvensi baru terkait perpajakan pada tahun 2019. Konvensi ini akan menjadi dasar pembentukan konferensi para pihak terkait isu perpajakan, yang memungkinkan seluruh negara berpartisipasi secara setara dan dapat melibatkan para anggota parlemen sebagai *observer*.
 - **Panelis meminta seluruh partisipan untuk meneliti secara berhati mengenai reformasi pajak**
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendorong agar proses negosiasi terkait perpajakan internasional dapat melibatkan para anggota parlemen, organisasi non-pemerintah, media, maupun publik secara seluas mungkin.
 - **Pajak konsumsi yang cenderung regresif**
Pajak konsumsi harus secara hati-hati dirancang untuk mencegah hal tersebut mempengaruhi kelompok miskin dan paling rentan.
- b. Rekomendasi bagi para anggota parlemen terkait mobilisasi pendapatan pajak:
- **Permintaan kerjasama internasional dari pemerintah**
Masalah penghindaran pajak lintas negara sulit diselesaikan secara nasional, sehingga dibutuhkan kerjasama global. Pola yang sama juga terjadi pada kejahatan lingkungan dan aliran finansial ilegal.

- **Mencari informasi dan menuntut transparansi**
Pembangunan sistem perpajakan yang terbuka dan transparan penting sebagai bentuk komitmen perbaikan. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan PBB, maupun organisasi lainnya.
- **Mempertimbangkan dampak terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)***
Beberapa proposal perpajakan dapat menimbulkan dampak terhadap pembiayaan SDG, dan mungkin memperburuk kesenjangan kekayaan antar kelas, maupun berbasis gender. Karena itulah setiap kebijakan perpajakan dapat menempatkan perspektif gender.
- **Melakukan pengawasan**
Menggunakan kewenangan pengawasan dan anggaran untuk memastikan lembaga perpajakan memiliki anggaran yang memadai.
- **Melibatkan peran berbagai kelompok**
Melibatkan kelompok perempuan, pemuda, dan berbagai kelompok marginal lainnya dalam setiap upaya negosiasi, pengambilan keputusan maupun kebijakan reformasi perpajakan.

c. Partisipasi Delegasi Indonesia

Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menyampaikan, urgensi kerjasama multilateral merupakan sarana yang efektif terkait pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Putu menegaskan Indonesia sangat serius merealisasikan SDGs. Terbukti secara eksplisit perundang-undangan dan regulasi Indonesia mencantumkan urgensi pencapaian SDGs.

Mengutip pernyataan Wakil Ketua BKSAP, “Kami sangat serius untuk merealisasikan SDGs. Secara eksplisit perundang-undangan, aturan, dan regulasi nasional kami mencantumkan urgensi pencapaian SDGs,” Pimpinan BKSAP lainnya juga menghadiri pertemuan tersebut, yaitu Wakil Ketua BKSAP DPR RI, **Dr. Mardani Ali Sera** dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, **Achmad Hafisz Tohir**.

Ia menyoroti Dua Pilar mengatasi tantangan perpajakan yang diadopsi dalam pertemuan internasional Bank Sentral dan Menteri Keuangan G20 di Bali, Februari 2022. Ia menyatakan, “Kedua pilar ini mendukung kesepakatan internasional tentang regulasi perpajakan atas produk dan layanan digital, serta pembentukan Global anti-base Erosi atau ambang batas pajak minimum global,”.

Lebih jauh ia menekankan perjanjian internasional memainkan peran penting menciptakan lingkungan global yang lebih adil bagi negara-negara dengan basis pasar yang sangat besar bagi perusahaan digital internasional seperti Indonesia. Di sisi lain, penetapan ambang batas pajak minimum global akan menjadi cara efektif mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh negara-negara surga pajak.

Bapak Rudana juga menyampaikan bahwa, “Perjanjian internasional memainkan peran penting menciptakan lingkungan global yang lebih adil bagi negara-negara dengan basis pasar yang sangat besar bagi perusahaan digital internasional seperti Indonesia. Sejalan dengan kesepakatan internasional, DPR RI telah mengesahkan satu peraturan perpajakan nasional yang baru dengan mengadopsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP),”



Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Putu Supadma Rudana
menyampaikan pandangan
Indonesia atas urgensi
pencapaian SDG's.

Foto: Dok BKSAP

4. BANTUAN DAN KEMITRAAN PUBLIK-PRIVAT

Bantuan pembangunan harus berdasarkan kepada 4 (empat) prinsip: kepemilikan /sesuai kebutuhan setiap negara, fokus pada hasil, transparansi dan akuntabilitas, serta kemitraan inklusif. **The Global Partnership for Effective Development Co-operation** merupakan aktor utama kerjasama donor dan pembangunan. Peran penting karena kemitraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan modalitas dan kerjasama global maupun nasional. Walaupun bantuan pembangunan telah mencapai nilai US\$. 178 miliar pada tahun 2021, dimana sejumlah US\$ 40 miliar dialokasikan bagi penanganan darurat COVID, tantangan masih besar, karena tingkat biaya hidup yang masih tinggi di beberapa negara. The United Nations

Development Programme (UNDP) baru saja membentuk *the Sustainable Finance Hub*, yang bekerja bersama untuk memperkuat pendanaan terkait SDGs.

Melakukan investasi pada sistem perpajakan dapat memberikan hasil yang baik. ***Tax Inspector Without Borders***, sebuah program kerjasama UNDP dan OECD, telah menghasilkan lebih dari US\$ 1.6 miliar dalam bentuk tambahan pendapatan dari pajak. Hal tersebut dicapai dengan melakukan peningkatan kapasitas lokal dan nasional terkait perpajakan. Setiap US\$ 1 yang diinvestasikan dalam peningkatan kapasitas penarikan perpajakan telah memberikan imbal balik sekitar US\$ 127. Berdasarkan hal ini, program UNDP, Tax for SDGs Initiative mendukung negara-negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas mobilisasi sumber daya domestik dalam pencapaian SDGs.



Delegasi BKSAP DPR RI
yang hadir pada
Persidangan UNHLPF.
Foto: Doc BKSAP

Berkaca pada alokasi khusus bantuan untuk memperkuat sektor kesehatan, pemerintah dan donor harus mampu menyediakan model pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Hal ini merupakan upaya pemenuhan komitmen internasional untuk mencapai pelayanan kesehatan universal. Bantuan yang disalurkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap negara ataupun komunitas, dengan penekanan pada aspek pencegahan. Sebagai contoh, Gavi, the Vaccine Alliance, secara luas diakui sebagai contoh sukses kemitraan. Metode yang dilakukan lembaga tersebut mengandalkan filantropi, bantuan pemerintah negara donor, NGO, akademia, dan sektor privat dalam melakukan imunisasi bagi anak-anak di negara termiskin di dunia.

Walaupun kemitraan publik-privat sering digambarkan sebagai situasi yang saling menguntungkan. Beberapa

Negara donor dapat menganggap bantuan yang dikucurkan sebagai investasi untuk dunia yang lebih baik,...

laporan menunjukkan bahwa kemitraan seperti ini dapat berakibat pada proses pengadaan yang lebih mahal daripada pengadaan tradisional, memiliki nilai keekonomian yang rendah, memberikan resiko yang tidak proporsional bagi negara, dan berpotensi membalikkan kemajuan yang telah dicapai terkait SDGs. Investor swasta juga condong untuk hanya melakukan investasi pada negara dan populasi yang paling menguntungkan secara nilai keekonomian. Kesepakatan kemitraan yang dihasilkan juga berpotensi menimbulkan konflik terkait penyediaan layanan publik yang luas, pelayanan kesehatan universal, dan mengurangi kesenjangan di dalam masyarakat.

The World Bank, melalui salah satu organnya yang menangani bantuan pembiayaan, The International Finance Corporation, baru saja mengumumkan bahwa lembaga tersebut akan menghentikan investasi pada pendidikan dasar, setelah melakukan evaluasi. Studi lainnya, yang berjudul “*Wrong Prescription: the Impact of Privatizing Healthcare in Kenya*”, menunjukkan bahwa privatisasi pelayanan kesehatan menjadikan layanan tersebut mahal, dan menghambat hak memperoleh pelayanan kesehatan.

Rekomendasi bagi para Anggota Parlemen terkait bantuan dan kemitraan publik-privat:

- **Meningkatkan bantuan untuk memenuhi komitmen internasional**

Terkait jumlah bantuan yang belum mencapai komitmen internasional sebesar 0.7 persen dari PDB, parlemen di berbagai negara donor perlu mendorong peningkatan anggaran yang dialokasikan terkait kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, Swedia dan beberapa negara lainnya mampu untuk mengalokasikan 1 (satu) persen dari PDB mereka untuk membiayai kerjasama pembangunan internasional. Negara donor dapat menganggap bantuan yang dikucurkan sebagai investasi untuk dunia yang lebih baik, bukan sekedar beban anggaran lainnya.

- **Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap bantuan**

Parlemen, baik di negara donor, maupun penerima harus melakukan pengawasan yang lebih ketat, baik terhadap bantuan atau hal lain terkait kerjasama pembangunan sebagai syarat untuk mencapai tujuan SDGs.

- **Berhati-hati dalam membangun kemitraan**

Melakukan pemeriksaan terhadap setiap kontrak maupun dokumen untuk memastikan tujuan pembangunan tepat sasaran dan sensitif gender diakomodasi dalam setiap perjanjian.

Peran serta DPR RI diharapkan dapat mendorong kebijakan nasional Indonesia yang mendukung pencapaian TPB terutama tujuan ke-17 terkait kemitraan.

- **Berhati-hati terhadap konflik kepentingan dan potensi yang dapat mempengaruhi masyarakat paling rentan**

Maksimalisasi profit sulit untuk disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyediakan pelayanan maupun kebutuhan publik. Berbagai program yang disusun harus dipastikan menjangkau kelompok tertentu seperti anak perempuan, perempuan, dan kelompok marginal lainnya, baik yang ada di pedesaan maupun lokasi lain yang sulit dijangkau.

- **Menjamin transparansi**

Seluruh kontrak dan negosiasi yang melibatkan pendanaan publik harus memiliki alur yang jelas terkait aliran uang, melibatkan masukan dari seluruh masyarakat, komunitas lokal, maupun seluruh pemangku kepentingan.

- **Melibatkan komunitas lokal dan organisasi setempat**

Penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pemantauan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Program yang disusun juga harus fokus pada kebutuhan masing-masing negara ataupun komunitas.

III. KESIMPULAN

1. Kehadiran Indonesia dalam menghadiri *2022 Parliamentary Forum at the UN High-level Political Forum on Sustainable Development* memiliki nilai strategis baik dalam penguatan diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI dengan negara-negara anggota IPU maupun dalam kerangka kerja sama multilateral antar parlemen IPU dan antara Indonesia dengan PBB;
2. Peran serta DPR RI diharapkan dapat mendorong kebijakan nasional Indonesia yang mendukung pencapaian TPB terutama tujuan ke-17 terkait kemitraan. Informasi yang didapatkan diharapkan dapat diterapkan oleh para anggota parlemen terkait fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang efektif dalam memastikan kemitraan yang dibangun baik oleh Anggota maupun pemerintah dapat membantu percepatan pencapaian SDGs.
3. Sesuai dengan salah satu tujuan yang tertera dalam TPB yakni *Partnership for the Goal*, maka dalam pertemuan ini banyak pembahasan yang menitikberatkan pentingnya keterlibatan parlemen dalam segala upaya penerapan TPB di tingkat nasional. Dalam pertemuan ini juga dibahas peran penting dan sinergi yang perlu dilakukan antara pemerintah, parlemen, dan juga dunia usaha dalam memastikan terwujudnya pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan.

IV. REKOMENDASI

1. BKSAP DPR RI agar dapat menyampaikan poin-poin yang dibahas dalam 2022 *Parliamentary Forum at the UN High-level Political Forum on Sustainable Development* kepada seluruh Komisi serta Alat Kelengkapan Dewan DPR RI guna memastikan tindak lanjut sesuai bidang yang ditangani dan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR RI terkait pentingnya sinergi dan kerjasama dalam rangka mencapai 17 tujuan yang tertera di dalam TPB.
2. Pengalaman keterlibatan aktif yang dilakukan DPR RI dalam *Parliamentary Forum at the UN High-level Political Forum on Sustainable Development* dapat didiseminasikan kepada masyarakat luas, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan BKSAP, antara lain BKSAP SDGs Day maupun pertemuan-pertemuan lainnya.

V. PENUTUP

A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan oleh Delegasi BKSAP DPR RI selama mengikuti *Parliamentary Forum at the UN High-level Political Forum on Sustainable Development* di New York - Amerika Serikat 11-15 Juli 2022 bersumber dari Mata Anggaran Keluaran (MAK). 001030.CF.5805.AEC.001.051.D.524211 sebesar Rp. 458.859.660 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan enam ratus enam puluh enam rupiah).

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

1. Dokumentasi Foto
2. Berita Media Cetak dan Elektronik
 - [“BKSAP DPR Tegaskan Indonesia Serius Realisasikan SDGS”](#). 14 Juli 2022.
 - [“Supadma Rudana: BKSAP Dorong Sustainable Development Goals \(SDGs\) Kerjasama Multilateral”](#). 15 Juli 2022.
 - [“Supadma Rudana Pimpin Delegasi BKSAP dalam Pertemuan Parlemen di New York, Gaungkan SDG Indonesia One Platform Jadi Role Model Kolaborasi Swasta dan Publik”](#). 15 Juli 2022.
 - [“Wakil Ketua BKSAP Promosikan Bali di Amerika Serikat, KTT G20 Momentum Pemulihan Pariwisata”](#). 15 Juli 2022.
 - [“Dari Forum Parlemen PBB di New York, PSR Ingatkan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Untuk Capai SDGs”](#). 14 Juli 2022.

C. KATA PENUTUP

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi DPR RI ke 2022 *Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development* pada tanggal 11-15 Juli 2022 di New York – Amerika Serikat. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2022

KETUA DELEGASI,



Putu Supadma Rudana, M.BA

A-563



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id